SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1395

FENOMENA MUSIK PUNK DAN KRITIK PERILAKU KORUPSI: STUDI KOMUNITAS PUNK DI TULUNGAGUNG

The Phenomenon of Punk Music and Criticism of Corrupt Behavior: A Study of Punk Community in Tulungagung

Iqbal Hermawan[1*]
Ahmad Izzul Ito[2]

*[1&2] Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Jawa Timur Indonesia

Email: hrmiqbal009@gmail.com
esuro25@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Fenomena korupsi di Indonesia merupakan persoalan struktural yang telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di tengah apatisme masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi secara formal, munculnya musik punk sebagai medium kritik sosial menjadi saluran alternatif untuk menyuarakan keresahan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Musik punk dengan karakter lirik yang lugas, keras, dan tanpa kompromi, mencerminkan semangat perlawanan terhadap sistem yang korup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana musik punk merepresentasikan kritik terhadap perilaku korupsi dan sejauh mana dampak pesan sosial dalam lagu-lagu punk terhadap kesadaran masyarakat, khususnya di Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap komunitas punk seperti "*Pop Punk Has No Age*" dan band "*Springbad Punk*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik punk berfungsi sebagai alat komunikasi sosial dan bentuk perlawanan budaya yang efektif di lingkungan komunitas. Lagu-lagu punk mampu membentuk kesadaran kritis, mendorong diskusi, bahkan aksi nyata dalam menolak praktik korupsi. Namun demikian, dampaknya masih terbatas pada komunitas tertentu karena faktor stigma dan gaya penyampaian yang tidak selalu dapat diterima masyarakat umum. Meskipun demikian, musik punk tetap menjadi sarana penting dalam membangun ruang refleksi dan memperkuat suara-suara alternatif yang selama ini terpinggirkan.

Kata Kunci:
Musik Punk
Kritik Sosial
Komunitas Punk
Kesadaran Masyarakat

Keywords:
Punk Music
Sosial Critism
Corupption
Punk Community
Public Awareness

Abstract

The Corruption in Indonesia is a deeply rooted structural issue that has significantly undermined public trust in government institutions. In response to the ineffectiveness of formal anti-corruption measures and the resulting public disillusionment, punk music has emerged as an alternative medium of expression and resistance. Characterized by bold, straightforward, and confrontational lyrics, punk music reflects the frustrations of marginalized groups and channels their criticism against unjust systems. This research aims to examine how punk music represents criticism of corruption and to assess the impact of its social messages on public awareness in Tulungagung. The study employs a qualitative descriptive approach, using data collected through field observation, in-depth interviews, and documentation of local punk communities such as "Pop Punk Has No Age" and the band "Springbad Punk.". The findings show that punk music functions not only as artistic expression but also as a vehicle of social communication and cultural resistance. Within its community, punk effectively raises critical awareness about corruption, inspires discourse, and encourages real-world actions such as protests and public murals. However, its impact on the wider public remains limited due to the confrontational style of punk and persistent social stigma. Even so, punk continues to serve as a meaningful cultural force, fostering reflection and amplifying alternative voices in the fight against corruption.

Submit Tgl.: 28-Juli-2025	Diterima Tgl.: 29-Juli-2025	Diterbitkan Tgl.: 30-Juli-2025

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan sosial yang kompleks dan sistemik di Indonesia. Ia bukan sekadar kejahatan hukum, melainkan bentuk nyata dari relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat. Dampaknya tidak hanya melumpuhkan integritas lembaga negara seperti pengadilan dan pendidikan, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Kofi Annan, 2004) menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah, mencerminkan lemahnya kontrol institusional dan budaya politik yang permisif.

Dalam kondisi stagnasi birokrasi dan melemahnya lembaga anti-korupsi, masyarakat mulai mencari ruang alternatif untuk menyampaikan kritik sosial. Salah satu bentuk ekspresi perlawanan yang menonjol adalah melalui musik punk. Punk bukan hanya genre musik, tetapi juga bentuk subkultur yang merepresentasikan resistensi terhadap sistem otoriter dan ketidakadilan sosial. Menurut (Hebdige, 1979), subkultur seperti punk menciptakan makna simbolik sebagai bentuk perlawanan kelas sosial yang terpinggirkan. Di Indonesia, subkultur punk berkembang sejak 1990-an dan menjadi kanal bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi yang tidak terserap dalam sistem formal.

Musik punk memiliki ciri khas lirik yang lugas, provokatif, dan konfrontatif. Hal ini menjadikannya sebagai medium kritik sosial yang kuat, sebagaimana dikemukakan oleh (Atton, 2002), bahwa musik punk adalah bagian dari media alternatif yang mampu membangun ruang wacana tandingan terhadap ideologi dominan. Dalam konteks ini, kritik sosial bukan hanya berupa wacana akademik, tetapi juga aksi budaya yang terstruktur. (Walzer, 1987) menegaskan bahwa kritik sosial adalah proses kolektif yang lahir dari pengalaman riil masyarakat, bukan dari abstraksi filosofis semata.

Fenomena ini juga ditemukan di Tulungagung, Jawa Timur, tempat tumbuhnya komunitas punk lokal seperti *Pop Punk Has No Age* dan band *Springbad Punk*. Mereka secara aktif menggunakan musik sebagai media untuk mengkritik praktik korupsi, menciptakan mural sosial, hingga menginisiasi diskusi publik. Komunitas ini tidak hanya menawarkan ekspresi estetik, tetapi juga membangun ruang sosial yang egaliter, berbasis nilai solidaritas dan prinsip *do it yourself (DIY)*. Menurut (Hannerz, 2013), punk adalah ekspresi budaya yang menyalurkan frustrasi terhadap sistem yang menindas. Maka, keterlibatan komunitas punk di Tulungagung merupakan refleksi dari upaya membangun kesadaran kritis di tingkat lokal.

Namun demikian, ekspresi semacam ini kerap dibayangi oleh stigma. Gaya berpakaian ekstrem dan bahasa lirik yang vulgar sering kali membuat pesan mereka tidak diterima oleh masyarakat umum. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara bentuk komunikasi alternatif dengan norma sosial dominan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana efektivitas musik punk dalam membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap komunitas punk di Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana musik punk merepresentasikan kritik terhadap korupsi serta menilai dampaknya terhadap kesadaran sosial masyarakat. Kajian ini berangkat dari pemahaman bahwa ekspresi budaya seperti punk bukan hanya pelengkap dalam studi sosial-politik, tetapi bisa menjadi jantung dari perlawanan masyarakat sipil terhadap sistem yang korup.

Urgensi akademik dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperluas perspektif civic education melalui pendekatan budaya. Dalam pendidikan kewarganegaraan, penguatan karakter antikorupsi tidak cukup hanya melalui doktrin normatif, tetapi perlu diperluas melalui media komunikasi yang kontekstual dan partisipatif. Oleh karena itu, musik punk sebagai ekspresi politik kaum marginal perlu dilihat sebagai bagian dari strategi membangun kesadaran publik dan memperkuat demokrasi partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam. Subjek penelitian adalah anggota komunitas punk di Tulungagung, termasuk "*Pop Punk Has No Age*", "*Paranoid Punk Movement*", dan band "*Springbad Punk*", serta akademisi yang memahami isu korupsi. Pengumpulan data dilakukan dari Februari hingga Juni 2025 di Tulungagung melalui tiga teknik utama:

1. **Observasi:** Pengamatan langsung terhadap kegiatan komunitas dan band punk untuk memahami pergerakan mereka dalam menyampaikan kritik.
2. **Wawancara:** Wawancara mendalam dan terstruktur dengan para informan untuk menggali pandangan mereka tentang peran musik punk dalam mengkritik korupsi.
3. **Dokumentasi:** Pengumpulan data dari sumber tertulis, foto, dan arsip yang relevan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif dari (Miles & Huberman, 2014), yang meliputi kondensasi data (pemilihan dan penyederhanaan), penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi metode dan sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Kritik Korupsi dalam Musik Punk

Hasil penelitian menunjukkan musik punk di Tulungagung merepresentasikan kritik terhadap korupsi melalui lirik yang lugas, langsung, dan provokatif. Arjun Nur Putra dari komunitas "*Pop Punk Has No Age*" menyatakan, "Lirik punk tidak banyak menggunakan metafora cenderung langsung menunjuk hidung pelaku korupsi dan sistem yang memungkinkan korupsi terjadi". Hal ini diperkuat oleh Resky Prima Putra, vokalis "*Springbad Punk*", yang membandingkan dengan genre lain, "lek punk roto-roto gae boso sing toknok/langsung tanpa basa basi" (kalau punk rata-rata pakai bahasa yang langsung tanpa basa-basi).

Gaya bahasa yang keras dan terkadang vulgar ini merupakan cerminan kemarahan dan kejujuran dalam menyuarakan keresahan rakyat. Bagi para pegiatnya, punk bukan sekadar musik, melainkan "senjata perjuangan". Selain melalui musik, kritik juga disampaikan melalui media lain seperti poster yang ditempel di ruang-ruang publik strategis.
Meskipun efektif di kalangan internal, jangkauan pesan ini terbatas. Sebagaimana diungkapkan Arjun, "efektif bagi pecinta musik punk sendiri tapi kalo orang diluar scene musik punk mungkin kurang". Hal ini disebabkan oleh karakter musik yang keras dan stigma negatif yang masih melekat pada subkultur punk.

Dampak Pesan Kritik terhadap Kesadaran Masyarakat

Dampak pesan kritik sosial dalam musik punk terhadap kesadaran masyarakat bersifat ganda. Di satu sisi, di dalam komunitasnya, pengaruhnya sangat kuat. Lagu-lagu bertema kritik mampu membangkitkan semangat, mendorong diskusi, dan memicu aksi nyata. Abi Syalom, basis "*Springbad Punk*", menegaskan bahwa kritik tidak berhenti pada lirik, "pesan itu lanjut di aksi. Kita...turun ke jalan, ngebentang spanduk, nulis mural anti-korupsi di tembok-tembok kota".
Di sisi lain, dampaknya pada masyarakat umum lebih terbatas. Musik punk sering dianggap ekstrem dan tidak semua orang dapat menerima gaya penyampaiannya. Namun, terdapat potensi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Pengalaman Resky Prima Putra saat tampil di sebuah acara desa menunjukkan bahwa masyarakat umum dapat mengapresiasi

keberanian lirik yang mengkritik pemerintah, meskipun gaya musiknya keras. Beberapa warga bahkan memberikan tanggapan positif, melihatnya sebagai "bentuk keberanian dan kejujuran dalam menyuarakan keresahan rakyat kecil".

Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi pandangan (Hebdige & Wijaya, 1999) mengenai punk sebagai bentuk *cultural resistance* dan (Oksinata, 2010) tentang punk sebagai gerakan yang memperjuangkan perubahan. Musik punk di Tulungagung berfungsi sebagai *subaltern counterpublics* (Fraser, 1990), yaitu ruang alternatif bagi kelompok marginal untuk menantang wacana dominan dan sistem yang korup. Meskipun menghadapi tantangan berupa stigmatisasi, musik punk tetap menjadi suara penting yang mengingatkan bahwa korupsi adalah masalah serius yang harus dilawan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa musik punk di Tulungagung memainkan peran signifikan sebagai medium kritik sosial terhadap korupsi. Representasi kritik diwujudkan melalui lirik lagu yang lugas, keras, dan langsung, yang berfungsi sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap sistem yang dianggap korup.

Dampak dari pesan kritik ini sangat terasa di dalam lingkungan komunitas punk, di mana ia mampu embangkitkan kesadaran kritis, mendorong solidaritas, dan memicu aksi-aksi perlawanan nyata. Namun, pengaruhnya terhadap masyarakat luas masih terbatas, terhalang oleh stigma negatif dan gaya penyampaian musik yang tidak selalu diterima oleh publik umum. Meskipun demikian, musik punk tetap memiliki potensi untuk membangun dialog sosial dan memperkuat suara-suara alternatif dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia.

REFERENSI

Atton, C. (2002). *Alternative Media*. Sage Publications.

Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. In *Social Text: Vol. 25/26*.

Hannerz, E. (2013). *Performing punk: Subcultural authentications and the positioning of the mainstream*.

Hebdige, D. (1979). *Subculture: The Meaning of Style*. Routledge.

Hebdige, D., & Wijaya, A. (1999). *Asal-usul & ideologi subkultur punk*. Penerbit Buku Baik. https://books.google.co.id/books?id=L8NdAQAACAAJ

Kofi Annan. (2004). *Secretary-General's Remarks on Anti-Corruption* [Broadcast].

Miles, M. B., & Huberman, A. (2014). M., & Saldana, J.(2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, *3*.

Oksinata, H. (2010). *Kritik sosial dalam kumpulan puisi aku ingin jadi peluru karya wiji thukul (kajian resepsi sastra)*.

Walzer, M. (1987). *Interpretation and social criticism* (Vol. 1). harvard university Press.